



FASILITASI KERJA SAMA TEKNIK UNTUK BADAN-BADAN PBB DI INDONESIA

Working Group on Administration, IUNCF 2023

Sari Pacific, 23 Oktober 2023

BIRO KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

TUSI BIRO KTLN

Koordinasi
Perencanaan
Pelaksanaan
Monitoring &
Evaluasi
Pengelolaan
Sistem Informasi
KTLN

01

**Fasilitas Kerja Sama
Teknik**

02

**Perjalanan Dinas Luar
Negeri**

03

**Kerja Sama Selatan-
Selatan dan
Triangular (KSST)**

4 PILAR KOORDINATOR NASIONAL



URUSAN HUBUNGAN LUAR NEGERI



URUSAN KEUANGAN NEGARA



KESELARASAN DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL



MANAJEMEN & FASILITASI KST

MITRA LOKAL/ PENERIMA MANFAAT KST DALAM NEGERI

K/L/D/I

BUMN

BADAN SWASTA

MASYARAKAT UMUM

MITRA PENERIMA MANFAAT KST LUAR NEGERI

NEGARA KURANG BERKEMBANG DAN/ ATAU BERKONFLIK DI KAWASAN ASIA, AFRIKA, DAN KEPULAUAN PASIFIK



MITRA PEMBANGUNAN ASING

BENTUK KERJA SAMA TEKNIK



Proyek KST



**Program
Pengembangan
Kapasitas**



**Tenaga Asing
KST**

JENIS FASILITAS KERJA SAMA TEKNIK

1

Layanan Fasilitas Keimigrasian / Kekonsuleran

2

Layanan Fasilitas Kepabeanan

3

Layanan Fasilitas Perpajakan

4

Layanan Fasilitas Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor

5

Layanan Fasilitas Nomor Polisi CD

DASAR HUKUM

LAYANAN KEIMIGRASIAN

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

LAYANAN KEPABEANAN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2022 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang Bertugas di Indonesia

LAYANAN PERPAJAKAN

PP Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

Peraturan teknis:

PMK 160/PMK.03/2014

PMK 161/PMK.03/2014

PMK 162/PMK.03/2014

DASAR HUKUM (2)

PEMBEBASAN PKB DAN BBN

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 101 Tahun 2017 tentang Pembebasan, Kelebihan Pembayaran dan Penagihan Pajak Daerah Kepada Perwakilan Negara Asing, Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional

NOMOR KENDARAAN CD

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor

FASILITAS PERPAJAKAN (PPN/PPNBM)

Beberapa Hal Penting:

1. Permohonan **pembebasan** PPN/PPnBM diajukan **sebelum** terjadinya transaksi/penyerahan barang/jasa. Dokumen yang dilampirkan: *copy proforma invoice / invoice / faktur pajak* dengan kode 080, *service agreement*, dll
2. Permohonan **restitusi** PPN/PPnBM diajukan **sesudah** terjadinya transaksi/penyerahan barang dan jasa. Dokumen yang dilampirkan faktur pajak dengan kode 010, *service agreement*, dll. Permohonan **restitusi** PPN/PPnBM dapat diajukan selama jangka waktu **1 tahun** sejak terjadinya transaksi.
3. Batas minimum pembelian barang/jasa (*Minimum Purchase Requirement (MPR)*) yang dapat diklaim pembebasan / restitusi PPNnya adalah senilai **Rp 2.500.000,- (dalam 1 faktur sebelum termasuk PPN-nya)**.
4. Apabila **barang kena pajak** yang telah mendapat pembebasan PPN/PPnBM dipindahtangankan (dijual) dalam jangka waktu **4 tahun**, PPN/PPnBM yang telah dibebaskan **wajib dibayar kembali** oleh Badan Internasional (Mitra Pembangunan), **kecuali** apabila pemindahtanganan dilakukan kepada **sesama penerima fasilitas** (Perwakilan Negara Asing dan Pejabatnya serta Badan Internasional dan Pejabatnya). Pembebasan PPN atas pemindahtanganan barang kepada sesama penerima fasilitas tersebut melalui prosedur dispensasi PPN.
5. Apabila **jasa kena pajak** yang telah mendapat pembebasan PPN/PPnBM **dipindahtangankan** (dijual), PPN/PPnBM **wajib dibayar kembali**.

FASILITAS PERPAJAKAN (PPN/PPnBM)

Kuota kendaraan lokal yang mendapatkan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM

Kantor

- paling banyak 6 unit untuk Kantor dengan jumlah pejabat lebih dari 5 orang
- Sejumlah pejabatnya untuk kantor dengan jumlah pejabat sama dengan atau kurang dari 5 orang

KUOTA KENDARAAN LOKAL

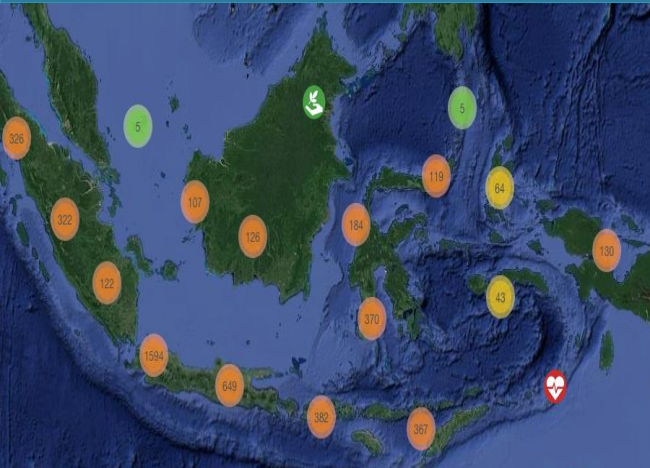
Untuk keperluan Program/proyek kerja sama teknik → sesuai kebutuhan yang disepakati oleh Badan PBB dan K/L Mitra Kerja Sama yang tertuang dalam perjanjian/dokumen proyek.

Untuk keperluan Pejabat PBB sebanyak 1 unit

SISTEM INFORMASI PROYEK KERJA SAMA TEKNIK (SIMPRO KTLN)



Simpro KTLN

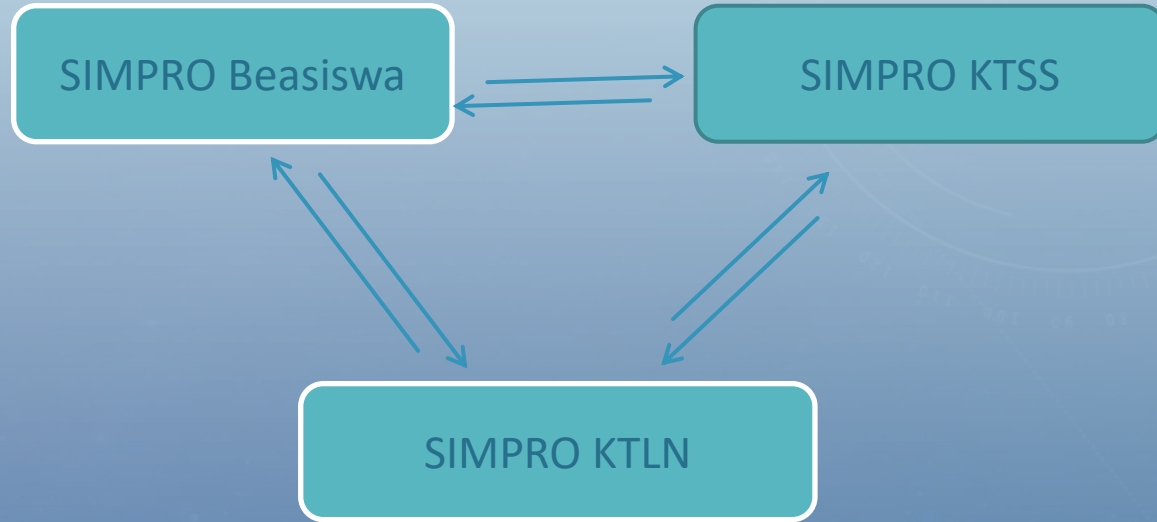


Reset

Filter

Simpro KTLN

Mitra Pembangunan Asing	Peace Corps
Mitra K/L	Kementerian Luar Negeri
Kategori Isu	Pendidikan
Nama Proyek	Peace Corps Indonesia
Deskripsi Proyek	Relawan bertugas sebagai pengajar bahasa Inggris dan pelatih guru bahasa Inggris di sekolah dan madrasah di NTT, Jabar, dan Jatim
Durasi Proyek	14/12/2021 s/d 14/12/2026
Perjanjian Proyek	MoU



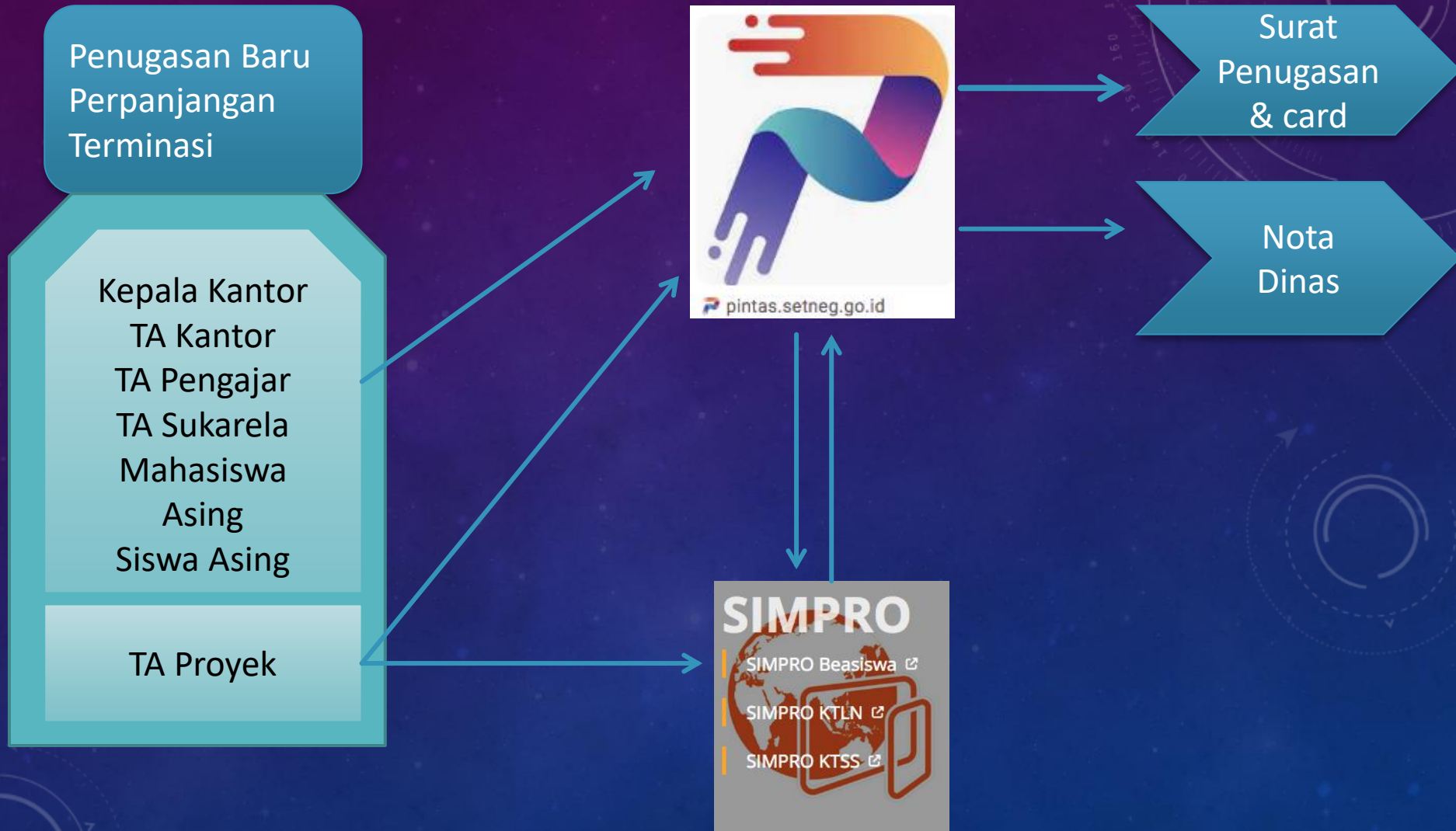
Informasi:

- Nama Mitra Pembangunan
- Nama Mitra K/L
- Nama Proyek
- Deskripsi Proyek
- Durasi Proyek
- Dokumen Perjanjian
- Lokasi (Provinsi, Kabupaten)

The background is a dark blue gradient with a subtle pattern of white stars and technical diagrams. In the top right, there is a large circular diagram with concentric circles and radial lines, resembling a technical drawing or a gauge. In the bottom right, there is a smaller circular diagram with a dashed outer ring and a solid inner ring, with arrows indicating a clockwise direction. In the bottom left, there is another circular diagram with a dashed outer ring and a solid inner ring, with arrows indicating a counter-clockwise direction. The text is centered in the middle of the image.

DIGITALISASI KERJA SAMA TEKNIK LUAR NEGERI

LAYANAN PERSETUJUAN TENAGA ASING



LAYANAN PERSETUJUAN TENAGA ASING (2)



PERSYARATAN PERMOHONAN

Kepala Kantor, TA Kantor, TA Pengaja, TA Sukarela, Mahasiswa Asing, Siswa Asing

Baru:

1. Permohonan dari Badan Internasional
2. Paspor
3. TOR/kontrak

Perpanjangan:

Evaluasi Tahun sebelumnya

TA Proyek

Nota Dinas

1. Surat Penugasan untuk Tenaga Asing
2. Keluarga (suami/istri dan anak tidak lebih dari 25 tahun) → paspor, akta menikah/ akta lahir
3. Izin tinggal yang lama untuk perpanjangan

Sama dengan syarat permohonan tenaga asing lainnya namun data proyek harus sudah terupload di SIMPRO

Alamat:

**Gd. Kemensetneg
Sayap Timur, Lt. 6
Jl. Veteran III No. 9
Jakpus 10110**

ktln.setneg.go.id

Terima Kasih

biro.ktln@setneg.go.id

